

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TABUNG GAS *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Ahmad Habibi**

## **ABSTRAK**

Kehadiran tabung gas LPG 3 kg merupakan hasil program pemerintah tentang konversi minyak tanah ke LPG. Namun Konversi minyak tanah ke LPG tersebut telah banyak menimbulkan permasalahan, yang kesemuanya perlu adanya perbaikan melalui pengaturan, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam pendistribusian gas LPG. Terjadinya masalah pelanggaran atas ledakan gas LPG telah banyak menyebabkan kerugian di pihak konsumen. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas LPG. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan KUHPerdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan tabung gas LPG. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat 2 permasalahan yaitu pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas LPG ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen ini berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : pertama, terhadap pelaku usaha tabung gas LPG yang melanggar hak-hak konsumen dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi antara lain yaitu melalui: penyelesaian di pengadilan (litigasi) atau penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun arbitase yang dilakukan berdasarkan pilihan para pihak.

**Kata kunci.** Perlindungan Hukum, Konsumen, Gas LPG.

**LAW ON CONSUMER PROTECTION TUBE GAS Liquefied Petroleum GAS  
(LPG) BASED ON LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER  
PROTECTION**

**Ahmad Habibi**

**ABSTRACT**

*The presence of 3 kg LPG gas cylinders is the result of the government program of kerosene to LPG. However, conversion of kerosene to LPG has generated a lot of problems, all of which need improvement through regulation, so that the government has an important role in the distribution of LPG gas. The occurrence of the violation on LPG gas explosions have caused many losses on the part of consumers. Therefore, it is necessary legal protection to consumers of LPG gas cylinders. Legal protection of the consumers shall be regulated by the Civil Code, Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Second, the Act is expected to ensure legal protection for consumers in the use of LPG. In connection with this, in this paper raised two issues: first, how the legal protection of the consumers of LPG gas cylinders in terms of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Both are efforts to do the consumers to obtain redress. In this study the authors used normative juridical research method. The approach with this method is intended to determine how important the law governing consumer protection is run in accordance with applicable law. Based on the discussion of the results of this study can be concluded that: first, the LPG business operators who violate the rights of consumers may be subject to criminal sanctions provided for in article 62 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Second, efforts to do the consumers to obtain redress, among others, through: the settlement in court (litigation) or settlement out of court (non litigation) is through negotiation, mediation, conciliation or arbitrase done by choice of the parties.*

*Keywords. Legal Protection, Consumer, LPG Gas.*